

CATATAN AKHIR TAHUN 2024

# PELUANG DAN TANTANGAN PERBAIKAN RUANG EKOLOGIS DI REZIM BARU

*Sepanjang 2024, persoalan ekologis masih terus terjadi. Belum ada gebrakan nyata dari rezim baru untuk mengatasinya.*

## PROLOG

# PELIBATAN PUBLIK MENDORONG PILKADA PRO RUANG EKOLOGIS

- Tahun 2024 merupakan tahun Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pesta demokrasi ini akan melahirkan pemimpin baru untuk 5 tahun ke depan.
- **Pertama**, pada Februari dilangsungkan Pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI serta DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. **Kedua**, pada November dilangsungkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Walikota.
- Generasi Z dan millennial miliki peran penting terhadap masa depan ruang ekologis untuk makhluk hidup dan partisipasi publik dipertaruhkan dalam Pemilu.
- Pertaruhan ini bermuara pada komitmen melestarikan ruang ekologis di tengah kerusakan yang dibiarkan rezim sebelumnya.
- Kerusakan ruang ekologis oleh pelaku kejahatan juga bersumber dari kebijakan dan keputusan politik. Pemberian izin yang tidak sesuai prosedur, korupsi serta tanpa partisipasi masyarakat adalah kebijakan yang sesat dan mengakibatkan kerugian perekonomian.



- Jikalahari mendorong Pemilu untuk makhluk ekologis yang artinya pemilu untuk memilih eksekutif dan legislatif yang memperhatikan dan memprioritaskan isu ekologis. Sebab, tanpa air, udara, pangan, hutan, oksigen serta keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, manusia akan punah.
- Pada Oktober 2023, Jikalahari bersama Koalisi di 8 provinsi melakukan audiensi ke KPU RI untuk mendorong KPU mewujudkan Pemilu untuk makhluk ekologis, salah satunya dengan memasukkan isu lingkungan hidup dan kehutanan dalam visi dan misi para calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Dalam Pilkada Riau, Jikalahari mendorong agar calon kepala daerah memasukkan isu ekologis untuk menyelesaikan persoalan ekologis yang terus terjadi seperti karhutla (karhutla), banjir, konflik agraria, konflik satwa serta kriminalisasi masyarakat adat dan tempatan oleh korporasi.
- Jikalahari melakukan pengawalan dalam proses pilkada untuk memastikan agar isu perlindungan ruang ekologis menjadi perhatian pembuat kebijakan. Sebab, tanpa adanya perhatian dari pemerintah, persoalan ekologis tak akan pernah terselesaikan.
- Jikalahari coba potret persoalan ekologis di Riau sepanjang 2024 yang terus berulang dalam Catatan Akhir Tahun 2024 ini.

# SOROTAN ISU LHK 2024

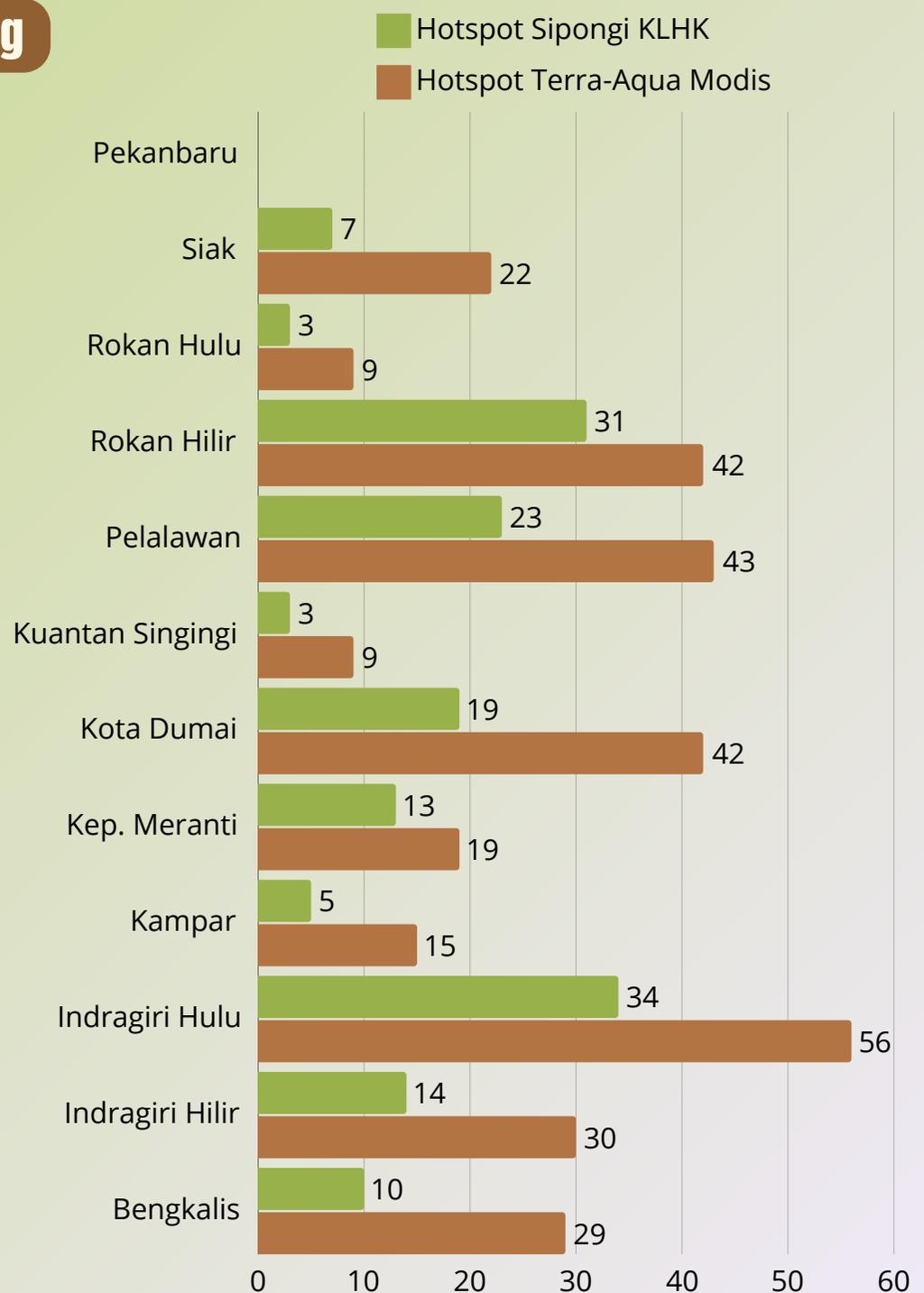
## A. Deforestasi, Hutan Alam Riau Tinggal Sepenggal

- Melalui citra Mosaic API Planet 2024, ditemukan **peningkatan deforestasi** dengan total **22.172 ha**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas deforestasi mencapai **1.474 ha**.
- Hutan alam Riau yang tersisa hanya **1.339.437 ha**. Tutupan hutan alam terluas di **Pelalawan** yaitu **226.000 ha** sedangkan paling sedikit di **Kampar** seluas **3.703 ha**.
- Sekitar **5.951 ha** luas deforestasi terjadi di kawasan perusahaan (IUPHHK dan sawit), **4.271 ha** pada kawasan konservasi, dan sisanya pada kawasan lain.



## B. Hotspot Menjulung, Karhutla Melenggang

- Menurut data Sipongi KLHK, Riau mengalami **penurunan karhutla** pada 2020-2022, namun **mengalami kenaikan** di tahun 2023-2024.
- Luas kawasan terbakar pada 2024 **10.674 ha, meningkat sebanyak 47%** dibandingkan tahun sebelumnya.
- Pada 2024, karhutla terluas di **Indragiri Hulu** capai **2.222 ha** dan di **Pekanbaru nihil**.
- Hasil data satelit Terra-Aqua Modis-C6 dengan confidence >70% tahun 2024, ditemukan ada **316 hotspot**. Sedangkan menurut Sipongi KLHK dengan confidence tinggi berjumlah **162 titik**.



**78** 🔥

kawasan konsesi HTI dan perkebunan sawit

**38** 🔥

kawasan konservasi

**233** 🔥

kawasan lahan gambut

## C. Jeritan Hutan Riau: Temuan Lapangan Penebangan Hutan Alam dan Perusakan Gambut

Jikalahari menemukan adanya perusakan gambut dan konflik antara perusahaan dengan masyarakat:

- Lahan Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM) di Indragiri Hilir bersempadan dengan PT Riau Indo Agropalma (PT RIA). Berdasarkan analisis citra satelit hutan alam seluas **376,80 ha** ditebang. Lahan ini berada di tiga desa, terdapat **penolakan** dari Desa Simpang Gaung.



- Areal PT Selaras Abadi Utama di Sp Teluk Makmur, Pelalawan. Ditemukan bukaan hutan **lebih dari 50 ha** pada tahun 2023. Lahan ini telah ditanam pohon akasia berumur lebih dari tiga bulan, serta pembuatan kanal dengan kedalaman **2-4 meter**.

- Ditemukan penebangan dan pembukaan hutan alam di PT RAPP Estate Sei Mandau, Siak. Tepatnya di Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dan di luar konsesi seluas **83,32 ha**. Sedangkan di APL dalam konsesi seluas **9,20 ha**.



## D. Banjir Menerjang, Korporasi Angkat Tangan

- Sepanjang tahun 2000-2023 tutupan hutan alam Riau **menghilang** seluas **2.556.179 ha**, setara dengan **dua kali luas Kabupaten Pelalawan**.
- Hutan alam yang **tersisa** hanya seluas **1.377.884 ha** atau hanya **seluas Kabupaten Pelalawan**.
- Dalam 6 tahun terakhir (2019 – 2024) ada 261 kejadian banjir di 592 lokasi tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau.
- Banjir menelan korban jiwa. Enam warga meninggal pada 2019—lima orang di Rokan Hulu, satu di Kuantan Singingi2— dan dua orang lainnya pada awal 2024—Pekanbaru dan Rokan Hilir— terseret arus banjir.



Sebaran lokasi terdampak banjir sepanjang 6 tahun terakhir di Riau

KABUPATEN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	GRAND TOTAL
Rokan Hulu	18	26	20	14	43	8	129
Kampar	8	3	22	5	18	17	73
Bengkalis	-	-	10	28	24	7	69
Kuantan Singingi	14	-	-	-	23	28	65
Indragiri Hilir	14	-	14	14	11	9	62
Indragiri Hulu	11	10	9	8	13	10	61
Rokan Hilir	-	4	2	29	-	13	48
Siak	-	-	10	21	-	2	33
Pelalawan	14	-	1	-	1	6	22
Kepulauan Meranti	-	-	4	5	4	-	13
Pekanbaru	1	1	-	-	2	5	9
Kota Dumai	-	-	-	-	3	5	8
Grand Total	80	44	92	124	142	110	592

- 50% hutan alam yang hilang berada dalam izin 215 HTI dan perkebunan sawit.
- Kini hutan alam tersisa hanya seluas 1,3 juta ha atau seluas Kabupaten Pelalawan.
- **Aktifitas HTI dan sawit di Riau** timbulkan deforestasi dan jadi penyebab utama banjir, sehingga dampak banjir semakin luas dan jumlah kejadiannya semakin meningkat.

## E. Perhutanan Sosial: Hutan Dikelola, Hutan Dijaga

- Hingga Desember 2024, Pemprov Riau sebut **realisasi PS mencapai 260 ribu hektar atau sekitar 20%**
  - Namun berdasarkan penelurusan GoKUPS14, usulan yang disetujui baru **168.177,3 ha**.
  - Rentang tahun 2023-2024 Jikalahari dampingi **13 desa** untuk usulkan PS dengan total luas **11.150,53 ha**.
- Dengan **rendahnya realisasi PS** di Riau, menunjukkan minimnya perhatian pemerintah terhadap akses hak kelola masyarakat atas hutan.
  - Pada 20 November 2024, Jikalahari kembali menyerahkan usulan PS di **4 desa** dengan total luas **1.085 ha**.

No	Desa	No. SK	Luas (ha)	Penerima Manfaat Langsung (KK)	Penerima Manfaat Tidak Langsung (KK)
1	Bantan Tengah	9847/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023	141	46	1020
2	Bantan Air	9848/MENLHK-PSKL/PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023	99	38	556
3	Ulu Pulau	9850/MENLHK-PSKL/PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023	284	73	410
4	Sekodi	9849/MENLHK-PSKL/PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023	561	39	510
<b>Jumlah</b>			<b>1.085</b>	<b>196</b>	<b>2.496</b>



## F. Konflik Masyarakat vs Korporasi: Tercerabutnya Masyarakat dari Tanahnya

Sepanjang 2024 konflik agraria masih terjadi antara masyarakat dan korporasi, baik HTI maupun perkebunan sawit, di antaranya:

**Warga Tebing Tinggi Okura, Tualang dan Maredan Barat dengan PT Surya Intisari Raya (SIR)**

PT SIR garap lahan lebih dari 5.000 ha, melebihi dari luasan izin HGU yang diberikan negara.

**Garuda Bertuah Melayu (GBM) – Petalangan dengan PT Serikat Putra**

Diduga PT. Serikat Putra menanam di luar izin HGU—diperkirakan seluas 400 ha mencakup beberapa desa di Kecamatan Bandar Petalangan dan Bunut—dan berada dalam kawasan hutan sekitar 183 ha.

**Kelompok Tani Desa Segati dengan PT Nusantara Sentosa Raya (NSR)**

Empat pekerja kebun sawit di Desa Segati, Syafrico, Juli Isnansar, Dede Rahim, dan Rahmadhani, ditangkap paksa sekitar 15 anggota keamanan PT NSR. Diduga, penangkapan ini ada kaitannya dengan perselisihan antara kelompok tani dan PT NSR.

**Aliansi Masyarakat Sipil Rokan Hilir (Almasri) dengan PT Salim Ivomas Pratama**

Almasri menolak perpanjangan HGU PT Salim Ivomas Pratama (PT SIMP) yang sudah habis sejak 31 Desember 2023. Aksi ini digelar ekstrem lantaran enam pengunjuk rasa menyemen kaki.

**Kerajaan Gunung Sahilan, somasi PT Nusa Prima Manunggal (NPM)**

Sri Paduka yang Dipertuan Agung Raja XII Rantau Kampar Kiri Kerajaan Gunung Sahilan, H Tengku Muhammad Nizar, SH.,Hum., hendak merundingkan tanah ulayat yang dikuasai oleh salah satunya PT NPM. Saat ini sudah 6 perusahaan HTI yang memiliki afiliasi dengan PT RAPP garap tanah ulayat, tanpa seizin Raja Kerajaan Gunung Sahilan

**Masyarakat Olak, Mandau dengan PT Nusa Prima Manunggal (NPM)**

Warga Kampung Olak, protes keras PT NPM yang masih terus menggarap lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 285 ha di daerah setempat.

**Petani Desa Sungai Raya dan Skip Hilir dengan PT Sinar Belilas Perkasa**

Konflik bermula setelah PT Sinar Belilas Perkasa (SBP), milik Dedi Handoko, membeli kebun sawit PT Alam Sari Lestari (ASL) yang telah pailit. Permasalahan muncul ketika alat berat milik PT SBP memasuki lahan masyarakat di Desa Sungai Raya dan Skip Hilir, lahan tersebut tak termasuk dalam HGU.

**Masyarakat Lubuk Batu Jaya, Kelayang, Peranap dan Ukui dengan PT Rimba Peranap Indah**

Masyarakat meminta kepastian hukum melalui adendum (perubahan) izin IUPHHK-HTI untuk mengeluarkan dan melepaskan areal kampung dan desa yang di dalamnya terdapat kebun karet dan kelapa sawit milik masyarakat. Persoalan masyarakat dan PT RPI ini sudah berlangsung sejak 1997 hingga hari ini belum ada kejelasan.

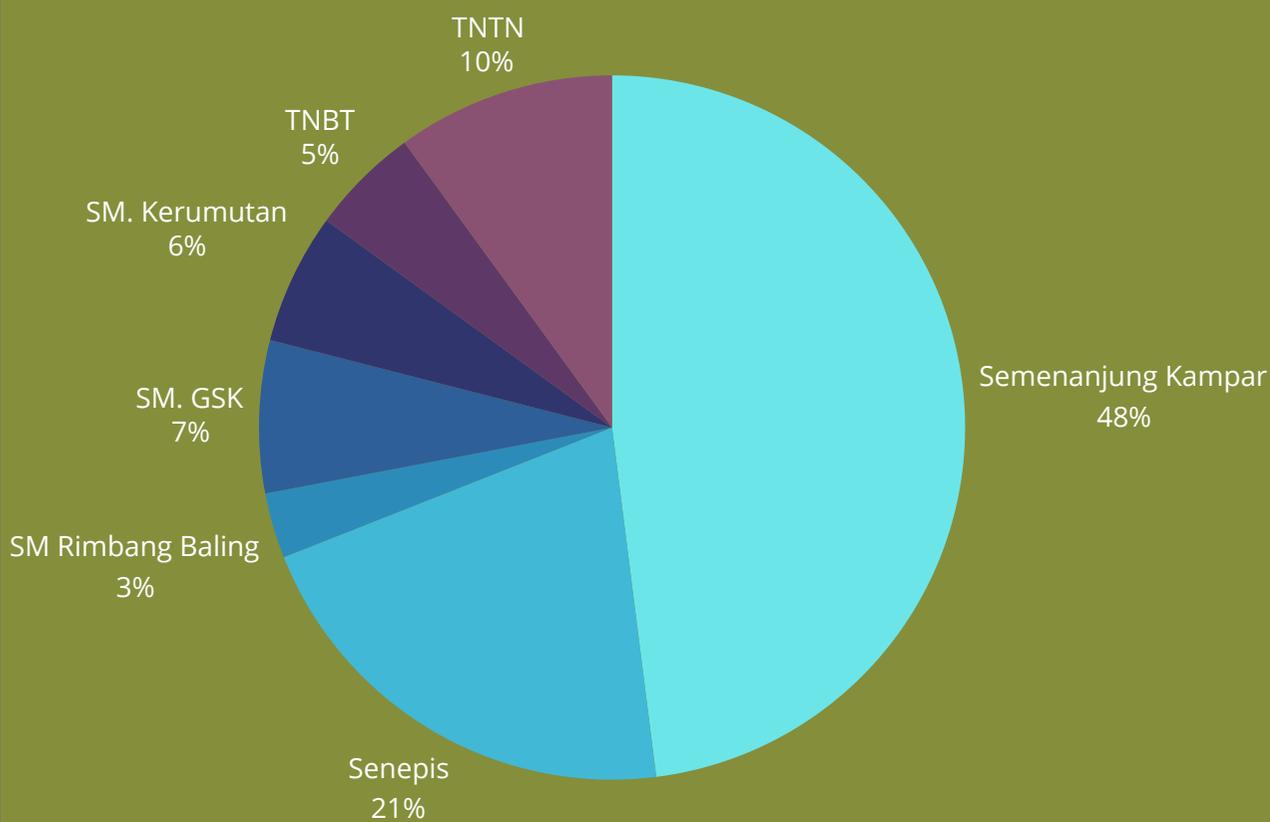


## G. Hutan Telah Hilang, Tuk Belang Mulai Berang

- Kejadian konflik manusia dan harimau (KMH) di Riau dalam satu tahun terakhir mencapai 4 kejadian (2 tewas dan 2 alami luka serius) di dua kabupaten, Siak dan Indragiri Hilir (Inhil).
- Sejak 2018 hingga 2024, tercatat sudah ada 15 kejadian serangan harimau dan menelan korban jiwa hingga 13 orang tewas dan 2 luka-luka

- Data Population Viability Analysis (PVA) KLHK tahun 2016 ada 7 kantong habitat harimau di Riau
- Ditemukan ada 36 perusahaan HTI dan 8 HGU perkebunan sawit yang berada di sekitar 7 kantong habitat harimau di Riau
- Jikalahari menemukan, tingginya kasus serangan harimau terhadap masyarakat di 15 lokasi kejadian, disebabkan lokasi tersebut memang berada di dekat ataupun dalam kawasan kantong harimau.
- Ada kaitan antara aktivitas korporasi dengan meningkatnya kejadian serangan harimau terhadap masyarakat di kawasan kantong harimau di Riau. Semenanjung Kampar dan Senepis, selaku 2 daerah kantong harimau, alami deforestasi tinggi dalam 10 tahun terakhir.

- Selama 2014 – 2023, terjadi deforestasi seluas 141.076,29 ha di kawasan kantong harimau. Untuk 2 wilayah deforestasi tertinggi yaitu Semenanjung Kampar, dari 67.317,45 ha deforestasi yang terjadi, 33% di antaranya disumbangkan oleh korporasi. Sedangkan Senepis yang kehilangan tutupan hutan alamnya mencapai 30.037,34 ha, korporasi menyumbangkan peran besar mencapai 79%.



- Hilangnya tutupan hutan dan terganggunya habitat harimau di kawasan ini, tidak terlepas dari aktivitas korporasi HTI dan HGU perkebunan sawit di areal tersebut.
- Terlihat bagaimana tidak ditemukannya kasus serangan harimau terhadap warga di sekitar Bukit Rimbang Bukit Baling karena minim deforestasi.

## H. Benang Kusut RTRWP Riau

**2 Mei 2024,**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau telah melakukan paripurna mengenai penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melanjutkan penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2024 - 2044.

**4 Juli 2024,**

DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2024 - 2044

**22 Juli 2024,**

Pansus Ranperda RTRW Provinsi Riau adakan rapat kerja bersama OPD terkait di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi V DPRD Riau.



- Berdasarkan penelusuran website DPRD Riau <https://dprd.riau.go.id/>, hingga Desember 2024, Jikalahari tidak menemukan informasi perkembangan ataupun dokumen Ranperda RTRWP Riau.
- Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan DPRD Riau dalam penyusunan Ranperda membuka ruang partisipasi publik secara maksimal dan bermakna
- Dalam rapat Pansus pembahasan dan penyusunan Ranperda RTRW Riau tahun 2024 - 2044 yang telah dilaksanakan, DPRD Riau tidak transparan, tidak melibatkan dan membuka ruang partisipasi publik.
- Dikhawatirkan peristiwa korupsi yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun dapat terulang kembali.

Beberapa poin penting yang harus segera ditindaklanjuti Pemprov Riau dalam Perda No 10 Tahun 2018 Tentang RTRW Provinsi Riau di antaranya:

1. Terkait Pasal 1 angka 6g: Terkait outline menurut majelis hakim hanya salah satu teknik simbolisasi yang tidak ada hubungannya dengan status atau peruntukan kawasan.
2. Terkait Pasal 23 ayat 4 dan pasal 38 ayat 1 dan 2: Menurut hakim, kawasan hutan tidak boleh serta merta dilepaskan untuk peruntukan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial,
3. Terkait Pasal 46 ayat 2 huruf c, d dan e: Karena wilayah yang masuk dalam outline adalah masih merupakan kawasan hutan akan tetapi dimanfaatkan untuk pemanfaatan non kehutanan sehingga bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan
4. Terkait Pasal 71 ayat 1 dan 2: Pasal ini bertentangan dengan Pasal 2 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempertimbangkan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Ruang, Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

## I. APP Tebang Kayu Alam, Jikalahari dan ICEL Lapor Gakkum KLHK



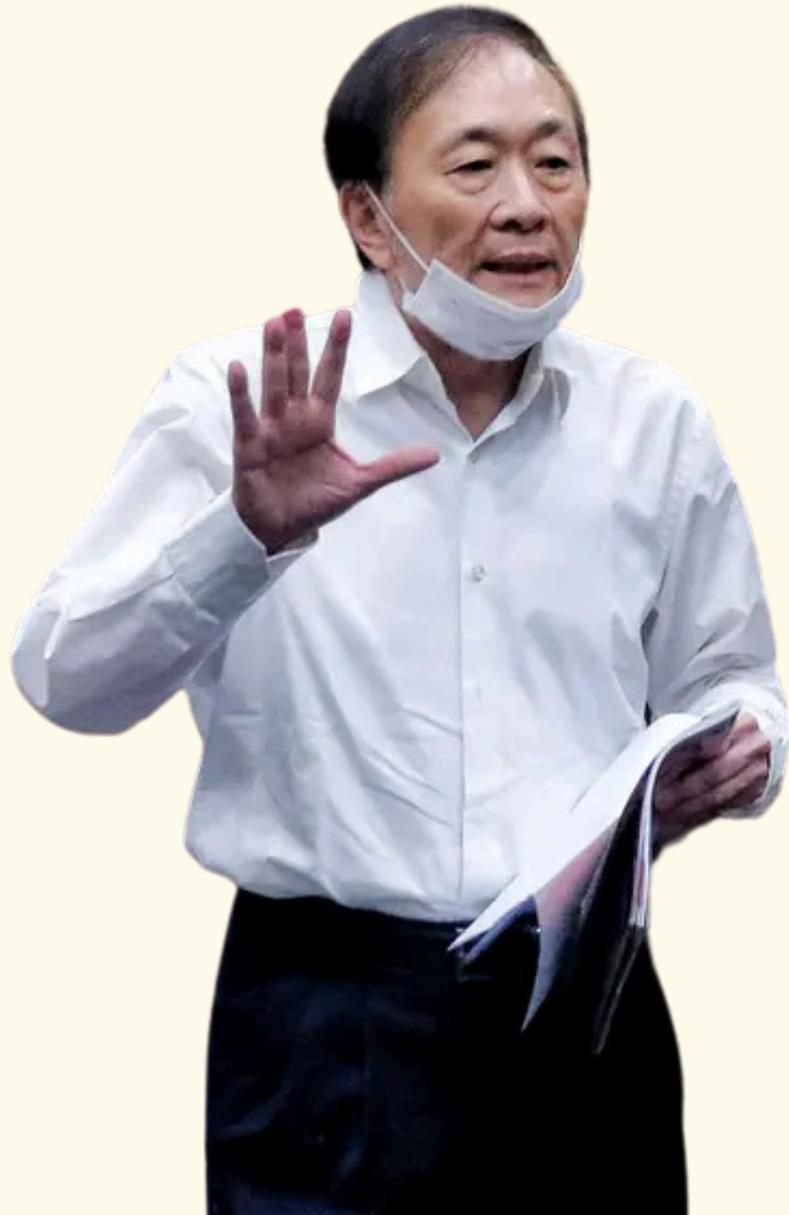
- **7 Maret 2024** Jikalahari dan ICEL melaporkan PT Arara Abadi, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Riau Indo Agropalma (RIA) yang terafiliasi dengan APP Sinarmas Group, dengan dugaan penebangan kayu alam ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK.
- **4 Maret 2024**, Laporan tersebut ditanggapi oleh APP Sinarmas Grup.
- Berdasarkan hasil investigasi internal pihak manajemen APP terkait temuan Jikalahari, APP menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu mitra pemasok yaitu PT RIA, karena tidak melaporkan kepada APP mengenai konversi batas konsesi seluas 57 ha yang berdampak pada Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) akibat perubahan Tata Batas Luar dan pengembangan kawasan baru.
- APP telah memberi peringatan tegas dan menuntut PT. RIA berkomitmen melakukan tindakan perbaikan untuk memulihkan kawasan HCV dalam waktu tidak lebih dari dua minggu sejak tanggal pernyataan ini dibuat. APP akan memantau tindakan perbaikan di wilayah yang terkena dampak dan ketidakpatuhan dalam penerapan tindakan perbaikan dapat mengakibatkan terhentinya pasokan kayu dari PT. RIA.



- Laporan ini berdasarkan pengecekan lapangan Jikalahari pada Februari 2024.
- Ditemukan fakta lapangan bahwa APP melalui Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM), bersempadan dengan PT RIA bekerja sama dengan PT Arara Abadi berdasarkan "Nota Kerja sama atas Hutan Rakyat" di tanda tangani oleh pihak pertama PT Arara Abadi dan pihak kedua KTSM serta diketahui Kepala Desa Belantaraya seluas 1.544 ha, menebang kayu alam dan kemudian di tanami akasia, membuat kanal baru di gambut dalam dan berkonflik dengan masyarakat.



## J. Korupsi Surya Darmadi: Merusak Hutan, Merugikan Negara



- Surya Darmadi seorang Taipan pemilik PT Darmex Group terlibat kasus korupsi sumber daya alam. Ia divonis bersalah penjara 16 tahun dengan denda Rp 2,2 triliun.
- Pada 23 Februari 2023, Majelis Hakim di PN Tipikor Jakarta Pusat menghukum Surya Darmadi penjara 15 tahun dan denda Rp 1 miliar. Pidana tambahan pembayaran ganti kerugian keuangan negara Rp 2,2 triliun dan perekonomian negara Rp 39,7 Triliun.
- Hakim mengatakan fakta-fakta hukum membuktikan Surya Darmadi mendapatkan keuntungan dari PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani Minus PT Palma Satu, sebesar Rp 2,2 triliun yang di dalamnya termasuk tidak menerapkan sawit plasma rakyat 20% senilai Rp 556 miliar
- Surya Darmadi mengajukan banding dan hasilnya PT DKI Jakarta menolak banding. Surya Darmadi kemudian menempuh upaya kasasi.
- Majelis hakim di tingkat Kasasi menyunat hukuman Surya Darmadi. Ketua Hakim Dwiarso menilai membebaskan uang pengganti Rp 39,7 triliun atas kerugian perekonomian negara tidak tepat. Majelis hakim kasasi menilai kerugian negara riil akibat perbuatan Surya Darmadi berjumlah Rp 2,6 triliun dan yang dinikmati Surya Rp 2,2 triliun.

### Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil

- Jikalahari dan Senarai kecewa dengan putusan Kasasi yang terkesan janggal dan adanya dugaan perlakuan khusus. Pasalnya hanya 11 hari waktu yang diperlukan Majelis Hakim MA memutus perkara kasasi Surya Darmadi. Ini aneh, janggal dan seolah-olah perkara ini mudah, ringan dan sederhana.
- Saat putusan PK, KPK malah menerbitkan Sprin.Henti.Dik/28A/DIK.00/01/06/2024 tertanggal 14 Juni 2024 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat ini diterbitkan karena kurang bukti dan MA telah membebaskan Suheri Terta Manager Legal Duta Palma pada putusan PK.
- Jikalahari dan Senarai menilai alasan penerbitan SP3 yang dilakukan oleh KPK terhadap Surya Darmadi dan PT Palma Satu, tidak tepat. Bahkan ini akan bisa menjadi alat korporasi penjahat lingkungan untuk bebas dari hukum.
- Pada 19 September 2024, Majelis Hakim MA Suharto, Ansori dan Noor Edi Yono menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Surya Darmadi. Jikalahari dan Senarai apresiasi putusan itu, tetapi tetap kecewa karena penghitungan kerugian ekologis tidak menjadi perhatian majelis hakim. Pasca putusan ini Kejagung harus segera melakukan eksekusi terhadap perbuatan korupsi dan pencucian uang yang telah dilakukan Surya Darmadi.



## K. Tak Ada Lagi Kriminalisasi Bagi Pejuang Lingkungan

Pada 30 Agustus 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerbitkan **PermenLHK Nomor 10 Tahun 2024** Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.

Peraturan ini terbit untuk memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat dari upaya kriminalisasi sehingga ia tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. **Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**



Permohonan dapat disampaikan oleh:

- a) pemohon Pelindungan Hukum sendiri, keluarga inti, atau yang diberikan kuasa mewakili;
- b) penasihat hukum pemohon Pelindungan Hukum;
- c) perseorangan yang diberikan kuasa mewakili dalam hal permohonan diajukan oleh masyarakat;
- d) pimpinan badan usaha atau Organisasi Lingkungan Hidup; atau
- e) akademisi/ahli.tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## L. Komitmen Pemerintah untuk Ekologis: Apa saja Prioritas Kebijakan Lingkungan dan Kehutanan dalam 5 Tahun Mendatang

- Dalam dokumen Daftar Prolegnas RUU Prioritas 2025 ada 41 RUU prioritas khusus kebijakan kaitan ruang ekologis (lingkungan hidup, kehutanan, masyarakat adat, hukum, dan lainnya) ada 13 kebijakan yang akan jadi prioritas di 2025
- Sepanjang 2025 – 2029, ada 176 RUU yang direncanakan akan dibahas dalam prolegnas, dan 22 diantaranya juga berkaitan dengan ruang ekologis..
- Kementerian Kehutanan yang saat ini dipimpin oleh Menteri Raja Juli Antoni juga paparkan 5 program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kemenhut dalam periode 5 tahun mendatang.

Naskah dan RUU Disiapkan Oleh	Judul Rancangan Undang-undang
DPR (Komisi III)	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
DPR (Komisi IV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Perubahan atas UUNomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</li> <li>• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</li> </ul>
DPR (Komisi XI)	RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
DPR (Komisi XII)	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
DPR (Badan Legislasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI</li> <li>• RUU tentang Komoditas Strategis</li> <li>• RUU tentang Pertekstilan</li> <li>• RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</li> </ul>
DPR (Anggota/DPD) Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim</li> <li>• RUU tentang Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>
DPD	RUU tentang Daerah Kepulauan

Sumber: Olah Data Jikalahari 2024

### 5 PROGRAM PRIORITAS

- Digitalisasi Layanan: Transparan, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola**
  - Digitalisasi Seluruh Layanan Kementerian Kehutanan
  - Digitalisasi Pembayaran Non-Tunai
- Penguasaan Hutan yang Berkeadilan**
  - Penyelesaian Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
  - Penertiban/Pencabutan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
  - Audit & Pemberlakuan Sanksi PB-PSWA
- Hutan Sebagai Sumber Swasembada Pangan**
  - Penyediaan Lahan untuk Food Estate
  - Perhutanan Sosial untuk Mendukung Makan Bergizi Gratis
- Menjaga Hutan Indonesia sebagai Paru-Paru Dunia**
  - Rehabilitasi Lahan Kritis
  - Menjaga Kekayaan Biodiversity
  - Antisipasi Ancaman Kebakaran Hutan
- Indonesia Satu Peta (One Map Policy)**
  - Kerjasama Membangun Indonesia Satu Peta

## M. Vonis Perambah Kawasan Hutan: Kait Kelindan Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan

- Jikalahari bersama Senarai melakukan pemantauan sidang **perambahan kawasan hutan di Bengkalis**.
- Kasus perambahan kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Siak Kecil dilakukan oleh **Eko Suropto, Pajo Riswandi, Yulius Zalukhu dan Suparmo**.
- Mereka merambah hutan yang berada di Desa Sungai Linau. Sedangkan Novrianto merambah di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Bengkalis. Mereka sudah membabat hutan seluas 356 hektar hutan yang sebagian besarnya sudah diubah menjadi kebun sawit.



### Putusan Hakim PN Bengkalis

Hakim Ketua Febriano Hermandy didampingi hakim anggota Rentama Puspita Farianty dan Aldi Pangrestu memutuskan Terdakwa Yulius Zalukhu alias Nias, Eko Supripto dan Suparmo Hadi Raharjo terbukti melanggar pasal tersebut yang termuat dalam Dakwaan Primer penuntut umum. Dijatuhi pidana penjara **1 tahun 6 bulan**.

Dari persidangan kasus ini, Jikalahari dan Senarai menemukan beberapa **fakta** di antaranya:

- a) Sengaja merambah kawasan hutan
- b) UU Cipta Kerja tidak berlaku untuk terdakwa
- c) Hutan menjadi sawit
- d) Tokoh desa turut menjual hutan

## N. FSC dan Remedy Framework: Bisakah APP dan APRIL Wujudkan Keberlanjutan dan Tak Rusak Hutan

*Forest Stewardship Council (FSC)* adalah **organisasi internasional nirlaba** yang didirikan pada tahun 1993. FSC memiliki tujuan utama untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan ekonomi di seluruh dunia.

FSC hadir untuk mengatasi masalah ini dengan menetapkan **standar pengelolaan** hutan yang **ketat** dan diakui secara **internasional**.

Banyak produk yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi FSC, salah satunya APP dan APRIL Grup. Mereka pernah ajukan permohonan, namun terhenti karena berbagai temuan yang tak sejalan dengan standar FSC. Kini, keduanya kembali ajukan permohonan sertifikasi melalui Remedy Framework (RF) atau kerangka remediasi FSC.

**Standar FSC** mencakup berbagai aspek pengelolaan hutan, antara lain:

- a) **Lingkungan:** Meliputi perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan tanah dan air, serta pengelolaan hutan yang tidak merusak ekosistem.
- b) **Sosial:** Meliputi penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, pekerja hutan, dan masyarakat sekitar hutan, serta memastikan adanya kesejahteraan sosial.
- c) **Ekonomi:** Meliputi pengelolaan hutan yang efisien dan menguntungkan secara ekonomi, serta memastikan adanya manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

### Standar FSC

## O. Kajian Komitmen NDPE dan Pembiayaan Industri Pulp dan Kertas di Indonesia

- Pada 20 September 2024 Jikalahari mempublikasi hasil kajian dengan tajuk: *Exporting Greenwashing? Analisis Kebijakan Bebas Deforestasi dan Komitmen NDPE dalam Rantai Nilai Pulp dan Kertas Indonesia* di Kekini Coworking Space Jl. Cikini Raya No.43, Menteng – Jakarta Pusat.
- Kajian ini awalnya hendak melihat rantai perizinan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari hulu hingga hilir (rantai perizinan) yang selalu mendapat perlakuan khusus oleh pemerintah.
- Dalam perkembangannya, kajian ini memperluas cakupan pembahasannya hingga membahas ekspor dan pembiayaan.
- Kemudahan dan perlakuan khusus tak sampai di situ, kajian ini juga menemukan kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atas komoditas pulp dan kertas berupa pembebasan pajak hingga pembebasan bea ekspor.



- Dalam rantai yang lain, industri pulp dan kertas juga mendapat pembiayaan cukup besar dari berbagai lembaga keuangan, baik dalam bentuk kredit maupun investasi, dari dalam maupun luar negeri.
- Kajian ini melihat bagaimana kebijakan pasar internasional menerima produk-produk pulp dan kertas tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
- Secara umum kajian ini telah memotret problem koordinasi antar kementerian, terutama yang dapat menjadi wilayah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia melakukan beberapa penyesuaian regulasi dan kebijakan, sehingga dapat menjawab permasalahan deforestasi dan ketelusurannya, yang kemudian dapat mencapai keselarasan dengan persyaratan Bebas Deforestasi Uni Eropa.

## P. Kajian Peran Sektor Pendanaan untuk Hentikan Kerusakan Ekologis dan Konflik Sosial

- Jikalahari melakukan kajian bersama Prakarsa— lembaga penelitian dan advokasi kebijakan yang fokus pada isu kebijakan sosial, fiskal dan pembangunan berkelanjutan—untuk melihat keterlibatan bank di balik permasalahan lingkungan, sosial dan tata kelola industri pulp dan kertas di Indonesia.
- Kajian ini dilatarbelakangi aktivitas industri pulp dan kertas yang sudah berlangsung lama dimulai pada periode 1990an hingga kini.
- Berbagai persoalan mengiringi perjalanan industri ini, baik persoalan tata kelola lingkungan yang buruk, konflik sosial yang terjadi, karhutla, deforestasi dan persoalan lainnya yang tak dapat dipisahkan dari aktifitasnya.
- Selain pemerintah, bank dinilai sebagai pihak lainnya yang harus turut bertanggungjawab atas aktivitas dari industri pulp dan kertas yang terus merusak ruang ekologis dan meningkatkan eskalasi konflik sosial di masyarakat.
- Khususnya bank-bank yang mendanai perusahaan-perusahaan ini sehingga mereka 'merdeka' beraktivitas tanpa perlu takut kehilangan sumber pendanaan.
- Kajian ini berusaha menggambarkan bagaimana bank-bank di Indonesia memiliki andil besar dalam mendukung praktik-praktik tak bertanggung jawab yang dilakukan korporasi pulp dan kertas.
- Bahwa, pemberian pinjaman yang dilakukan bank-bank di Indonesia, tanpa memperhatikan aspek berkelanjutan, minimnya uji tuntas dari bank hingga lemahnya pengawasan dari pihak bank terhadap 'klaim berkelanjutan' yang diberikan korporasi kepada bank menjadi nila setitik yang terus memperburuk kondisi lingkungan dan masyarakat.
- Dalam penelitian ini, Prakarsa dan Jikalahari meninjau dampak yang ditimbulkan dari industri pulp dan kertas, terutama aktivitas perusahaan yang berafiliasi dengan Sinarmas dan Royal Golden Eagle Group (APRIL Group), di tiga desa di masing-masing kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis (wilayah adat Suku Sakai), Siak (Desa Dayun), dan (Desa Gondai) Pelalawan.

## Q. Pembohongan Publik pada COP29 di Azerbaijan



- COP (Conference of the Parties) diselenggarakan pada 11-22 November 2024 di Baku, Azerbaijan.
- Membahas dua topik utama: Pendanaan Iklim dan Nationally Determined Contributions (NDC) dengan hasil Utama: Baku Finance Goal (BFG).
- Juga menyoroti tanggung jawab perusahaan pemegang konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Salah satu perusahaan pemegang konsesi PBPH untuk HTI di Riau ialah APRIL Group.

Jikalahari menyayangkan adanya pembohongan publik yang dilakukan oleh APRIL Group.

- Diduga terlibat korupsi Kehutanan (2002–2009) melibatkan 16 korporasi afiliasi APRIL Group.
- kerugian ekologis, ekonomi, dan pemulihan lingkungan mencapai Rp 687 triliun (2012).
- Anak usaha APRIL Group (PT SAU dan PT RAPP Estate Sungai Mandau) diduga menebang hutan alam, membuka kanal baru, merusak ekosistem gambut dengan fungsi lindung, dan menanam akasia di luar konsesi tanpa izin.

## R. Kabinet Merah Putih: Seberapa Krusial Isu Ekologis jadi Perhatian

- **Presiden Prabowo Subianto** melantik kabinet pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta dengan fokus utama pemerintahan: Mengatasi krisis iklim, isu ekologis, dan efisiensi sumber daya alam.
- Ada dua kementerian yang berperan penting yakni, **Kementerian Lingkungan Hidup** yang kini dipimpin oleh **Hanif Faisol Nurrofiq**, dan **Kementerian Kehutanan** yang dipimpin oleh **Raja Juli Antoni**.



### Program Raja Juli Antoni:

- Digitalisasi Layanan
- Penguasaan Hutan Berkeadilan
- Food Estate
- Rehabilitasi Lahan Kritis
- Indonesia Satu Peta

### Kritik:

- Program food estateancam hutan dan hak masyarakat
- Hilirisasi SDA dianggap merugikan upaya emisi karbon.



### Program Hanif Faisol Nurrofiq, Prioritas 100 Hari:

- RPPLH sebagai landasan hukum pengelolaan SDA
- Pengelolaan TPA regional.
- Pembangunan desa berbasis iklim.
- Evaluasi dan penguatan pasar karbon.
- Pendekatan ekonomi sirkular dan nilai ekonomi karbon.

### Tantangan:

- Ketidakseimbangan antara kebijakan lingkungan dan fokus ekonomi agresif.
- Minim pengawasan dan penegakan hukum pada proyek SDA besar (misalnya food estate di Kalteng).

## S. Masa Depan Suram Pemberantasan Korupsi: KPK Lama vs KPK Baru



- Pelantikan pimpinan KPK dilakukan pada 16 Desember 2024 di Istana Negara oleh **Presiden Prabowo Subianto**. Serah Terima Jabatan (Sertijab) dijadwalkan pada 20 Desember 2024.
- Komposisi pimpinan: **Setyo Budiyo (Ketua)** didampingi **Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono**.

- **Agus Joko Pramono** merupakan satu-satunya pimpinan KPK periode 2024- 2029 yang tidak berasal dari unsur penegak hukum.

Kekhawatiran yang Dihadirkan:

- Revisi UU KPK dianggap memperlemah posisi lembaga, termasuk pembatasan **Operasi Tangkap Tangan**.
- Komitmen pimpinan dalam mengusut kasus besar seperti Surya Darmadi diragukan.

Harapan untuk Masa Depan:

- KPK diharapkan segera meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
- Jikalahari mendesak pimpinan KPK terpilih mundur dari lembaga asal demi menunjukkan independensi dan keseriusan menangani korupsi.

## T. Pemimpin Riau Baru: Pertaruhan Masa Depan Ruang Ekologis Riau



- Pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto terpilih dengan 1.224.193 suara (57,5% dari total suara sah).
- Tidak ada gugatan hukum terhadap hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, menunjukkan penerimaan luas atas hasilnya.

Visi dan Misi Gubernur-Wakil Gubernur

- Visi: "Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju."
- 7 misi meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan ekonomi berbasis pembangunan berkelanjutan.

Kritik terhadap Isu Ekologis

- Analisis Jikalahari: Tidak ditemukan komitmen nyata dari Wahid-SF Hariyanto, dalam mengatasi isu ekologis (karhutla, konflik agraria, masyarakat adat).

Debat Publik

- Debat Pertama: Wahid-SF Hariyanto tidak menyentuh isu lingkungan hidup dalam tema tata kelola pemerintahan dan pembangunan inklusif.
- Debat Kedua: Jawaban mengenai ekonomi hijau dan biru tidak menyentuh persoalan lingkungan hidup dan kehutanan secara mendalam.

**Lalu apakah ada harapan perbaikan, peningkatan perekonomian, serta perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 5 tahun mendatang?**

## EPILOG

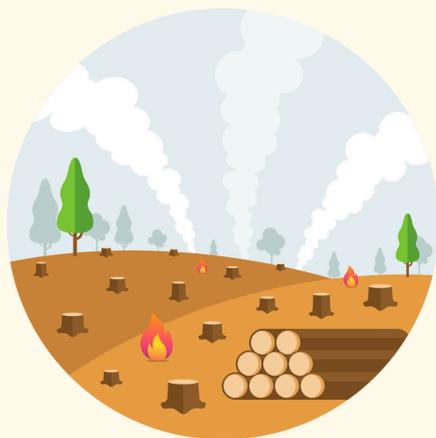
# MERAGUKAN KOMITMEN PRABOWO MENINDAK TEGAS PELAKU PERUSAK LINGKUNGAN DAN HUTAN



- Saat kampanye, Prabowo berkomitmen menindak tegas pelaku pencemaran, merusak lingkungan, dan pembakaran hutan. Ia juga berkomitmen melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal, serta memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.
- Dua puluh hari sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan perdana ke Great Hall of the People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Prabowo turut mengajak sejumlah konglomerat Prabowo 'mengendors' para pengusaha untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.
- Kedekatan Prabowo dengan para pengusaha akan menjadi hambatan pemerintahannya menjalankan visi misi untuk menghukum para korporat pelaku tindak pidana lingkungan hukum dan sumber daya alam.
- Keraguan atas komitmen juga muncul dari tindak-tanduk para menterinya seperti kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif ke kompleks PT RAPP. Kunjungan Menteri seperti menjadi tradisi melanjutkan kebiasaan pemerintahan Jokowi.
- Prabowo perlu menegur menteri-menteri yang coba-coba menganak emaskan perusahaan merusak lingkungan, lagi-lagi agar tidak membuatnya sulit dan tidak berani menjalankan komitmen dalam visi-misinya untuk menghukum para korporasi yang terlibat karhutla dan merusak hutan di Riau
- Ketegasan Prabowo terhadap komitmen melawan merusak lingkungan hidup dan hutan serta melakukan perbaikan harus terus dikawal dan terus dihidupkan. Bagaimanapun 5 tahun ke depan, kedaulatan rakyat berada di tangan Prabowo



Catatan akhir tahun Jikalahari 2024 ini adalah salah satu instrumen untuk memonitor sekaligus diharapkan menjadi 'peluit' atas tindakan yang pemerintah yang mengarah kepada jalan yang keliru. Sorotan Isu, peristiwa, politik Nasional dan daerah, ruang kelola masyarakat hingga korupsi sumber daya alam di sepanjang 2024 setidaknya bisa kita bahas dalam beberapa fokus.



- Data kehutanan terkait deforestasi, karhutla, banjir dan kerusakan habitat satwa. Hutan alam Riau jumlahnya terus menyusut pada 2024 tersisa hanya 1.339.437 ha.
- Total deforestasi sepanjang 2024 seluas 22.172 ha, di konsesi HTI dan sawit sekira 5.951 ha luas, pada kawasan konservasi sekira 4.271 ha dan sisanya berada pada kawasan lainnya.
- Karhutla masih terjadi, data Sipongi KLHK, sepanjang 2024 karhutla di Riau mencapai seluas 10.674 ha, meningkat 47% dari tahun 2023.
- Persoalan Banjir juga menjadi persoalan. Jumlah kejadian dan areal terdampak semakin besar.

- Perluasan ruang kelola masyarakat yang masih lambat. Hingga Desember 2024, Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan realisasi PS hingga Desember 2024, mencapai 260 ribu hektar atau sekitar 20%67 dari target. Namun berdasarkan penelusuran website GoKUPS, usulan PS di Riau yang telah disetujui mencapai 168.177,3 ha dengan jumlah unit SK sebanyak 158, bertambah 16 SK dalam rentang waktu hampir 1 tahun, dan jumlah KK terdampak mencapai 30.495 KK.
- Menilik luasan usulan PS yang telah disetujui per provinsi, dari 37 provinsi di Indonesia, Riau menempati posisi ke 17. Di sisi lain, konflik antara masyarakat dengan korporasi juga tak kunjung hilang.



- Peraturan yang belum berkeadilan bagi lingkungan hidup dan masyarakat. DPR RI telah mengeluarkan daftar prolegnas 2025-2029. Begitu juga dengan DPRD Riau, telah menetapkan prolegda prioritas dalam masa jabatan periode 2024-2029.
- Salah satu perda yang masuk prioritas adalah Ranperda RTRWP Riau. RTRWP Riau merupakan peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA. Sayangnya pembahasan di DPRD Riau belum bisa diakses publik.

- Korupsi SDA yang melibatkan Taipan Surya Darmadi pemilik PT Darmex Grup. Surya Darmadi dihukum 16 tahun penjara dan denda Rp 2,2 triliun karena kasus pencucian uang atas membangun perkebunan secara ilegal di kawasan hutan.
- Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung. Namun korupsi suap yang melibatkan Surya Darmadi yang ditangani oleh KPK justru diSP3kan.
- Pada 2024 ini juga terjadi pergantian Pimpinan KPK. Aktor-aktor yang terpilih didominasi latar belakang unsur APH lain seperti Polri, Kejaksaan hingga hakim. Terdapat kontroversi dan penolakan atas terpilihnya Pimpinan KPK 2024-2029.



- Pergantian rezim, mulai dari Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota. Jikalahari juga memantau kabinet merah putih yang dibentuk oleh Prabowo.
- Selain itu juga terdapat Pilkada serentak di seluruh Indonesia Provinsi Riau akan memiliki Gubernur Baru, setelah KPU Riau menetapkan pasangan Abdul Wahid dan SF Hariyanto sebagai pemenang Pilkada dan tidak adanya gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Jikalahari memberikan catatan terhadap Cagub-Cawagub terpilih sejak sebelum Pilkada

- Sepanjang tahun ini, Jikalahari juga memproduksi beberapa kajian terkait sumber daya alam seperti, kajian komitmen NDPE dan pembiayaan industri pulp dan kertas di Indonesia.
- Lalu ada kajian peran sektor pendanaan untuk hentikan kerusakan ekologis dan konflik sosial dan berbagai policy brief terkait
- Jikalahari juga aktif merespon berbagai isu lingkungan hidup dan kehutanan, baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat global. Di antaranya merespon pembohongan publik oleh APRIL Grup pada COP 29 di Azerbaijan serta berbagai isu SDA-LH yang berkembang di tengah-tengah publik.





Dari ketujuh persoalan di atas justru mengarah pada degradasi kualitas lingkungan hidup. Perlu ada upaya serius untuk mendorong pemerintahan baru baik di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Oleh Jikalahari merekomendasikan:



Presiden Prabowo untuk tegas menjalankan visi-misi untuk menindak tegas dan menghukum seberat-beratnya pelaku perusak hutan dan melindungi ekologis dengan tidak menganak-emaskan pengusaha-pengusaha perusak Ekologis.



Mendorong Presiden dan DPR RI membuat Undang-Undang yang memperhatikan karakteristik dan fakta lapangan yang khas termasuk sosial budaya masyarakat. Merevisi undangundang bermasalah, UU 11 Tahun 2020 jo UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU 19 Tahun 2019 tentang KPK.



Gubernur Riau dan DPRD membahas Perda RTRWP Riau dan perda lainnya yang mengedepankan penyelamatan hutan alam tersisa, serta mengakomodir hak masyarakat adat serta proses pembentukan yang dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.



Gubernur Riau mempercepat penyelesaian konflik SDA dengan pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan tempatan serta mempercepat realisasi ruang kelola masyarakat berupa perhutanan sosial mulai dari perizinan hingga ke pada pengelolaannya.